

Revitalisasi Mata Kuliah Wajib Kurikulum Berbasis Proyek: Upaya Meningkatkan *Civic Engagement* dan Karakter Kewargaan

Agung Tesa Gumilar^{a, 1*}, Rahmat^{a, 2}, Cecep Darmawan^{a, 3}, Leni Anggraeni^{a, 4}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ agungtesgum@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Maret 2025;

Revised: 10 Mei 2025;

Accepted: 30 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Revitalisasi;

Mata Kuliah Wajib

Kurikulum;

Berbasis Proyek;

Civic Engagement;

Karakter Kewargaan.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji revitalisasi Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) berbasis proyek dalam upaya meningkatkan *civic engagement* dan karakter kewargaan melalui Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Telkom. Studi ini didasarkan pada pentingnya peran pendidikan tinggi dalam membentuk warga negara yang aktif, reflektif, partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran MKWK selama ini dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menjawab tantangan tersebut, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis integrasi antara kebijakan nasional, kebijakan internal perguruan tinggi, serta penerapan model pembelajaran berbasis proyek melalui pendekatan *Digital-Based Collaborative and Active Learning to Create Meaningful Education*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis melalui reduksi data, pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi MKWK mampu memperkuat *civic engagement* dan karakter kewargaan mahasiswa, seperti tanggung jawab sosial, sikap kritis, kepedulian terhadap isu publik, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Keberhasilan ini ditopang oleh kurikulum yang transformatif, strategi pembelajaran yang kolaboratif, serta dukungan kebijakan dan kelembagaan yang progresif.

ABSTRACT

Keywords:

Revitalization;

Mandatory Curriculum
Course;

Project-Based;

Civic Engagement;

Citizenship Character.

Revitalization of Compulsory Subjects of Project-Based Curriculum: Efforts to Improve Civic Engagement and Citizenship Character. This study investigates the revitalization of project-based mandatory curriculum courses, specifically Pancasila Education and Civic Education aimed at enhancing civic engagement and citizenship character among students at Telkom University. It is grounded in the recognition of higher education's critical role in cultivating active, reflective, participatory, and responsible citizens in a democratic society. Existing MKWK have not been fully effective in addressing this goal, thereby calling for more contextual and participatory learning approaches. Using a qualitative case study method, the research examines how national policies, institutional strategies, and project-based learning models are integrated through the *Digital-Based Collaborative and Active Learning to Create Meaningful Education* framework. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were processed through data reduction, categorization, and interpretation. The findings reveal that revitalizing MKWK courses significantly contributes to strengthening students' civic engagement and citizenship qualities, including social responsibility, critical thinking, concern for public issues, and active participation in community life. This success is supported by a transformative curriculum, collaborative teaching strategies, and progressive institutional and policy support.

Copyright © 2025 (Agung Tesa Gumilar, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Gumilar, A. T., Rahmat, R., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2025). Revitalisasi Mata Kuliah Wajib Kurikulum Berbasis Proyek: Upaya Meningkatkan Civic Engagement dan Karakter Kewargaan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 884–898. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.12137>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran mahasiswa sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab (Ditjen Dikti, 2020). Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, yang ditandai oleh perubahan sosial yang cepat serta meningkatnya pengaruh budaya, *civic engagement* menjadi indikator krusial untuk menilai kualitas demokrasi dan efektivitas peran sosial warga negara (Putnam, 2000). Hal ini terutama relevan bagi generasi muda, karena partisipasi mereka mencerminkan tingkat keberdayaan warga dalam merespons dinamika sosial-politik kontemporer. *Civic engagement* dipahami sebagai sikap aktif warga negara, baik secara individu maupun kelompok, untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. Keterlibatan ini tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga didorong oleh semangat dan komitmen kuat untuk melakukan perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nasirin & Isnarmi, 2019). Di Indonesia, upaya penguatan *civic engagement* dan karakter warga negara diakomodasi dalam kebijakan pendidikan tinggi, terutama melalui pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), yakni Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, yang bersifat wajib di seluruh perguruan tinggi (Ditjen Dikti, 2020).

MKWK tidak sekadar berfungsi sebagai muatan dasar, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai kebangsaan, keberagaman, dan tanggung jawab sosial. Namun studi yang dilakukan Kurniawaty, (2023) implementasi MKWK masih menunjukkan disparitas dalam metode, strategi, dan pendekatan antar institusi, sehingga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas MKWK dalam membentuk *civic engagement* dan karakter mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam pelaksanaan MKWK di sejumlah perguruan tinggi, khususnya di Universitas Telkom, serta kontribusinya terhadap peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan sosial.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020, penyelenggaraan MKWK bertujuan membentuk karakter, watak, dan keadaban mahasiswa yang bermartabat. Tujuan ini menjadi semakin mendesak di tengah tantangan pendidikan abad ke-21, terutama dalam menghadapi disrupsi teknologi dan sosial yang menyebabkan pergeseran nilai di kalangan mahasiswa. Studi Gofur & Sunarso (2019) mengungkapkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan masyarakat masih rendah, hanya sekitar 42,2% hingga 43,3%. Angka ini menunjukkan lemahnya kesadaran sosial serta rendahnya penguasaan nilai, sikap, dan keterampilan kewargaan yang esensial dalam membentuk karakter ideal sebagai warga negara.

Kondisi ini mengisyaratkan perlunya intervensi sistematis melalui pendidikan karakter yang menekankan nilai etika publik dan keadaban sosial. Rahmat & Tanshzil (2017) menegaskan bahwa pembinaan karakter yang efektif harus terintegrasi dalam sistem pendidikan tinggi, salah satunya melalui MKWK. Dalam konteks ini, MKWK berperan sentral sebagai instrumen pembelajaran nilai-nilai kewargaan yang progresif dan transformatif, membangun kesadaran kolektif mahasiswa agar terlibat aktif dalam masyarakat secara etis dan bertanggung jawab.

Melalui MKWK, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga menginternalisasi nilai luhur bangsa serta mengaplikasikan ilmu secara kontekstual

dalam merespons persoalan sosial, kebangsaan, dan kemanusiaan. Maka, MKWK tidak sekadar pelengkap kurikulum, melainkan fondasi ideologis dan etis yang membentuk generasi muda yang berkarakter dan kompetitif secara global.

Kontribusi terhadap kemajuan bangsa adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas akademik. Mahasiswa sebagai generasi penerus dituntut untuk tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kecakapan hidup dan integritas moral. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menekankan bahwa pendidikan tinggi bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan beriman, kreatif, mandiri, dan berbudaya, serta menguasai IPTEK untuk kemajuan bangsa. MKWK, dalam kerangka ini, menjadi bagian integral untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui pembentukan landasan etik dan tanggung jawab sosial mahasiswa.

Lebih jauh, Pasal 4 Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga membentuk watak dan peradaban bangsa melalui tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan tinggi merupakan ruang transformasi yang melahirkan agen perubahan sosial yang berpikir kritis, peduli terhadap masyarakat, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. MKWK memainkan peran penting dalam membentuk identitas kewargaan mahasiswa, serta menanamkan etika publik dan nilai demokrasi sebagai bekal menjalankan peran strategis tersebut.

Mahasiswa memiliki potensi besar dalam menjawab berbagai tantangan kebangsaan, baik melalui penguasaan ilmu maupun keterlibatan sosial. Anggraeni (2016) menegaskan bahwa tanggung jawab mahasiswa tidak berhenti di ruang kelas, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan tinggi perlu menjembatani capaian akademik dengan kecakapan sosial-kewargaan melalui penguatan implementasi MKWK. Salah satu strategi penting dalam pengembangan sumber daya manusia adalah melalui *civic engagement*, yaitu partisipasi aktif warga negara dalam kegiatan sosial sesuai kapasitas dan keterampilannya (Nasirin & Isnarmi, 2019). Keterlibatan ini tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan sosial yang positif. Dalam hal ini, perguruan tinggi berperan sebagai agen pembentuk karakter kewargaan.

Revitalisasi MKWK, khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter kewargaan mahasiswa di era kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas sosial dan penetrasi budaya digital. Selama ini, implementasi MKWK cenderung bersifat normatif dan formalistik, sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan aktual pembelajaran kewargaan yang kritis, kontekstual, dan transformatif. Padahal, sebagaimana ditegaskan Jacoby & Associates (2009), *civic engagement* tidak dapat dibentuk hanya melalui pengajaran teoritis, melainkan harus ditumbuhkan melalui pengalaman nyata mahasiswa dalam kehidupan komunitas yang memungkinkan mereka mengembangkan kesadaran sosial, tanggung jawab publik, dan partisipasi aktif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan *civic engagement* dalam ranah pendidikan tinggi, namun masing-masing memiliki keterbatasan

yang membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Misalnya, Saleh (2023) mengembangkan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kecakapan abad ke-21 yang efektif dalam membentuk *civic engagement* mahasiswa, namun belum mengintegrasikan aspek kebijakan MKWK secara eksplisit dalam kerangka pembelajarannya. Sementara itu, Kurniawaty (2023) mengkaji implementasi kebijakan MKWK dalam pembinaan karakter mahasiswa, tetapi belum secara mendalam mengaitkannya dengan penguatan *civic engagement* sebagai tujuan strategis. Sementara itu studi yang dilakukan Hidayah (2020) berfokus pada pengembangan Model Belajar Keterlibatan (MBK) yang memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* di era digital, namun tidak secara spesifik membahas keterkaitan antara kebijakan MKWK dan praktik pembelajaran di perguruan tinggi.

Ketiga studi tersebut menunjukkan urgensi perlunya pendekatan yang mampu mengaitkan secara holistik kebijakan nasional dan institusional terkait MKWK dengan desain dan praktik pembelajaran yang berbasis pada kolaborasi, refleksi kritis, dan keterlibatan sosial yang nyata. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi gap yang ada dengan mengkaji revitalisasi MKWK secara komprehensif, melalui integrasi kebijakan dan penerapan model pembelajaran berbasis proyek dengan model *Digital-Based Collaborative and Active Learning* sebagai strategi untuk memperkuat *civic engagement* mahasiswa secara kontekstual dan berkelanjutan. Dengan demikian, *civic engagement* menjadi medium efektif yang menghubungkan mahasiswa dengan realitas sosial. Mahasiswa tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Maka dari itu, integrasi *civic engagement* dalam MKWK merupakan langkah strategis agar mahasiswa tidak hanya menjadi lulusan yang cerdas, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Jacoby & Associates (2009) kembali menegaskan bahwa keterlibatan sebagai warga negara dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi komunitas. Mahasiswa, dalam menjalankan peran akademiknya, diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, penguatan konsep *civic engagement* di kalangan mahasiswa melalui MKWK menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berdaya sosial dan kontributif terhadap kemajuan bangsa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena dianggap paling tepat untuk memahami secara mendalam bagaimana penyelenggaraan MKWK, terutama Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dapat memperkuat *civic engagement* dan karakter kewargaan. Pendekatan ini membantu peneliti menangkap situasi sosial, nilai-nilai yang berkembang, dan pandangan para pelaksana kebijakan secara menyeluruh (Creswell, 2014). Penelitian dilakukan di Universitas Telkom dengan melibatkan informan utama, yaitu Kepala Bagian Pengembangan Akademik sebagai penanggung jawab pelaksanaan MKWK dan Dosen pengampu kedua mata kuliah tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang

kontekstual (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Selanjutnya, data dianalisis dengan metode tematik, melalui reduksi data, pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan (Braun & Clarke, 2006).

Hasil dan pembahasan

Penyelenggaraan MKWK, khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan dinamika yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor strategis dalam sistem pendidikan tinggi. Hasil penelitian menggambarkan penyelenggaraan MKWK didasarkan pada regulasi nasional dan peraturan internal dari perguruan tinggi. Pertanyaan untuk mengetahui bagaimana kerangka regulatif penyelenggaraan MKWK di Universitas Telkom telah ditanyakan pada M selaku Kepala Bagian Pengembangan Akademik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MKWK sebagai berikut:

“Dasar penyelenggaraan MKWK di Universitas Telkom mengacu pada UU Pendidikan Tinggi dan Kepdirjen Dikti yang diterjemahkan ke dalam pedoman akademik. Pedoman ini bersifat umum dan mengatur klasifikasi mata kuliah, termasuk MKWK, ke dalam kategori wajib kurikulum, wajib universitas, wajib prodi, serta mata kuliah pilihan prodi dan universitas”.

Berdasarkan hasil wawancara, penyelenggaraan MKWK tidak sepenuhnya berada di tangan individu Dosen atau institusi pendidikan tinggi semata, tetapi mengikuti kerangka regulatif yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam dokumen resmi seperti Kepdirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020, serta modul akademik yang disusun oleh tim pakar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan substansi pembelajaran MKWK ditetapkan dalam kerangka kebijakan nasional yang seragam, namun implementasinya tetap memberikan ruang otonomi kepada perguruan tinggi untuk menyesuaikan dengan karakteristik institusional dan kebutuhan mahasiswa mereka.

Selanjutnya pertanyaan terkait dengan dinamika kelembagaan dan kapasitas implementasi dari berbagai kerangka regulatif nasional yang dirumuskan Universitas Telkom dalam penyelenggaraan MKWK, Kepala Bagian Pengembangan Akademik menyatakan bahwa:

“Penyusunan pedoman akademik di Universitas Telkom dilakukan secara bertahap dan melibatkan koordinasi lintas unit melalui forum Rakor Aksi. Forum ini menjadi wadah komunikasi antara pimpinan dan program studi untuk merumuskan kebijakan berbasis masukan kolektif. Salah satu hasilnya adalah pedoman pelaksanaan MKWK berbasis proyek digital yang ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik”.

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukan bahwa Kepdirjen Dikti dan berbagai regulasi lainnya menunjukkan adanya kerangka normatif yang kuat dari negara dalam menentukan arah pembelajaran MKWK. Tujuan pembelajaran yang menekankan kesadaran akan kehidupan bersama sebagai masyarakat nasional dan global menunjukkan orientasi yang tidak hanya nasionalistik tetapi juga kosmopolit. Namun, untuk dapat mencapai tujuan luhur ini, pembelajaran tidak cukup hanya disampaikan secara normatif-instruksional. Diperlukan pendekatan pedagogik yang kritis, analitis, dan reflektif yang tidak sekadar menyampaikan

pengetahuan, tetapi mentransformasikannya menjadi kesadaran dan tindakan. Artinya, kebijakan pendidikan tinggi tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi memiliki dimensi transformasional yang mengharuskan implementasi dilakukan secara kontekstual dan dinamis.

Berdasarkan uraian di atas, pandangan Grindle (1980) sangat relevan dalam menyoroti pentingnya konteks kelembagaan dalam implementasi kebijakan. Grindle menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi, komitmen aktor pelaksana, serta konteks sosial-politik tempat kebijakan itu diterapkan (Grindle, 1980). Dalam konteks ini, Universitas Telkom menunjukkan kapasitas kelembagaan yang lebih matang karena mampu menerjemahkan kebijakan nasional MKWK ke dalam pedoman internal yang eksplisit, termasuk integrasi pendekatan pembelajaran berbasis proyek.

Sebagaimana ditegaskan oleh Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan aktor pelaksana. Dalam konteks ini, Universitas Telkom dapat dijadikan contoh praktik baik (*best practice*) karena menunjukkan kapasitas adaptif dalam mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) ke dalam struktur MKWK mereka. Hal itu dipertegas oleh pendapat Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh faktor-faktor seperti kejelasan tujuan, konsistensi kebijakan, serta struktur administratif yang mampu mengatur jalannya pelaksanaan secara hierarkis dan terkontrol. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan implementasi bukan semata-mata karena kejelasan arah kebijakan nasional, tetapi juga ditentukan oleh seberapa jauh institusi pendidikan tinggi mampu menyesuaikannya dengan sumber daya, budaya akademik, serta strategi pembelajaran yang kontekstual dan relevan.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran MKWK berbasis proyek ditanyakan kepada R selaku Dosen pengampu Pendidikan Pancasila, Ia menegaskan bahwa:

“Saat ini, perencanaan pembelajaran dalam RPS dirancang berbasis proyek, di mana mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga turun ke lapangan untuk meneliti masalah sosial. Pendekatan ini menekankan pengukuran proses pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari *input* hingga *outcome*, bukan hanya sekedar *output*. Dengan demikian, fokus pembelajaran mencakup pengembangan keterampilan teknis (*hardskill*) sekaligus keterampilan sosial dan emosional (*softskill*)”.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pembelajaran MKWK di Universitas Telkom merujuk pada RPS dan didasarkan pada tiga kegiatan di antaranya: (a) Kurikuler, yakni kegiatan pembelajaran yang terstruktur untuk mampu mencapai tujuan dari Program Studi; (b) Kokulikuler, yakni kegiatan pembelajaran yang terprogram atas bimbingan dari dosen sebagai bagian dari kurikulum dan dapat diberikan bobot setara atau dua kali satu satuan kredit semester; dan (c) Ekstrakulikuler, yakni meliputi kegiatan penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Berdasarkan uraian di atas, pembagian kegiatan pembelajaran menjadi tiga domain menandai pergeseran penting dari pendidikan berbasis konten menuju pendidikan berbasis pengalaman. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang autentik, partisipatif, dan kolaboratif. *Civic engagement* tidak mungkin ditumbuhkan hanya melalui

ceramah di kelas, tetapi melalui keterlibatan langsung mahasiswa dalam dinamika sosial kemasyarakatan, baik dalam bentuk proyek sosial, magang di lembaga publik, maupun program pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain, *civic engagement* harus menjadi *lived experience* mahasiswa, bukan sekadar topik kajian. Di sinilah peran besar institusi dan dosen untuk menciptakan ruang-ruang otentik yang memungkinkan mahasiswa mengalami, merefleksikan, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai kewarganegaraan yang substantif.

Kemudian pertanyaan mengenai bagaimana relevansi tujuan pembelajaran dikaitkan dengan evaluasi pembelajaran MKWK yang dapat mendorong keterlibatan warga negara dan pembentukan karakter kewargaan juga ditanyakan kepada Y selaku Dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan, Ia menyatakan bahwa:

“Capaian pembelajaran (CLO dan PLO) telah ditetapkan, dengan PLO dari program studi dan CLO berdasarkan aturan kementerian yang disederhanakan menjadi tiga poin sesuai pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian melibatkan tugas, kuis, dan peran aktif mahasiswa dalam proyek sosial, tanpa ujian tengah atau akhir semester, karena fokus pembelajaran adalah proyek”.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam konteks ini jika merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Riset dan Teknologi, kegiatan pembelajaran MKWK di Universitas Telkom juga telah diarahkan untuk menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus atau *case method* dan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek atau *team-based project* dengan bobot penilaian 50%. Berdasarkan keputusan tersebut terutama pembelajaran berbasis proyek, memberikan penekanan akan metode pembelajaran yang merespon tuntutan dan perkembangan zaman yang berbasis nilai-nilai luhur bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa karakteristik pembelajaran MKWK di Universitas Telkom sudah mengarah pada aspek interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa merupakan *respons* terhadap tuntutan pedagogis abad ke-21. Namun, perlu dicermati bahwa karakteristik ini hanya dapat terwujud jika dosen memiliki kapasitas pedagogis dan pedagogi kritis yang memadai. Keberadaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan sembilan elemen wajib merupakan instrumen strategis untuk menyelaraskan visi kebijakan nasional dengan praktik pembelajaran yang aktual di ruang kelas.

Penerapan metode pembelajaran *case method* dan *team-based project* sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri 210/M/2023 tentang IKU menandakan arah strategis pemerintah dalam mentransformasikan sistem pendidikan tinggi agar lebih adaptif terhadap tantangan global dan kebutuhan lokal. Pembelajaran berbasis proyek menuntut kolaborasi lintas disiplin, penguasaan *soft skills*, dan orientasi pada pemecahan masalah nyata. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan *civic engagement* tidak lagi cukup dibangun melalui diskursus normatif tentang nilai dan etika, tetapi harus dikonkritkan dalam bentuk aksi kolektif yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Proyek sosial, misalnya, dapat menjadi arena efektif untuk mempertemukan teori dan praktik, serta membentuk watak kewargaan yang aktif, reflektif, dan bertanggung jawab.

Peta konsep di bawah ini menggambarkan dimensi-dimensi utama dari *civic engagement* atau keterlibatan kewargaan, yang mencakup aktivitas sosial, politik elektoral, dan bentuk ekspresi politik lainnya sebagai berikut:

Tabel 1. *The 19 Core Indicators of Engagement*

<i>Core Indicators of Engagement</i>
Civic indicators
Community problem solving
Regular volunteering for a nonelectoral organization
Active membership in a group or association
Participation in fund-raising run/walk/ride
Other fund-raising for charity
Electoral indicators
Regular voting
Persuading others
Displaying buttons, signs, stickers
Campaign contributions
Volunteering for candidate or political organizations
Indicators of political voice
Contacting officials
Contacting the print media
Contacting the broadcast media
Protesting
E-mail petitions
Written petitions
Boycotting
Buycotting
Canvassing

Sumber : Keeter, zukin, Andolina and jenkins (2002)

Berdasarkan peta konsep *Core Indicators of Engagement* (Keeter, 2002) yang memuat indikator *civic engagement*, *electoral participation*, dan *political voice* selaras dengan arah pembelajaran MKWK di Universitas Telkom yang berbasis *case method* dan *team-based project*. Implementasi Keputusan Mendikbudristek No. 210/M/2023 menandai pergeseran paradigma pembelajaran dari sekadar transfer pengetahuan menjadi proses pembentukan karakter dan kompetensi kewargaan yang aktif dan reflektif. Proyek sosial yang dijalankan dalam mata kuliah ini, seperti riset partisipatif, advokasi komunitas, atau kampanye berbasis nilai-nilai kebangsaan, secara langsung mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam bentuk keterlibatan kewargaan dan artikulasi suara politik sebagaimana diklasifikasikan dalam peta konsep tersebut.

Lebih dari itu, karakteristik pembelajaran MKWK di Universitas Telkom yang interaktif, kontekstual, integratif, dan kolaboratif mencerminkan *respons* terhadap tuntutan pedagogis abad ke-21 yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan. Hal ini juga memperkuat capaian pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education (OBE)*, di mana keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari kemampuan kognitif, tetapi juga dari kontribusi nyata mahasiswa terhadap masyarakat melalui kegiatan seperti pemecahan masalah komunitas, penggalangan dana sosial, dan advokasi isu-isu kebangsaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran MKWK di Universitas Telkom telah bergerak progresif dalam mengintegrasikan aspek kebijakan nasional, kebutuhan lokal, dan prinsip *civic engagement*. Arah ini tidak hanya merealisasikan capaian Indikator Kinerja Utama pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi strategi implementatif dalam menumbuhkan warga negara muda yang aktif, beretika, dan berdaya secara sosial-politik sesuai semangat Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa revitalisasi MKWK, khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan bagian penting dari agenda strategis nasional dalam membentuk warga negara yang aktif, reflektif, dan bertanggung jawab. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti), MKWK dirancang untuk menumbuhkan kesadaran hidup bersama dalam konteks masyarakat nasional dan global. Tujuan ini mengindikasikan bahwa MKWK tidak sekadar transmisi nilai-nilai kebangsaan secara normatif, melainkan juga sebagai wahana pedagogis yang menuntut pendekatan kritis, analitis, dan reflektif melalui dialog yang kreatif dan partisipatoris. Pembelajaran MKWK harus memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami substansi dasar kajian, tetapi juga berkarya nyata dan memiliki motivasi belajar sepanjang hayat. Hal ini tercermin dalam karakteristik pembelajaran MKWK yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipetakan bagaimana penyelenggaraan MKWK di Universitas Telkom dalam mendorong keterlibatan warga negara dan memperkuat karakter kewargaan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur penyelenggaraan MKWK di Universitas Telkom

Peta konsep tersebut menggambarkan alur strategis implementasi pembelajaran MKWK dalam membentuk karakter dan keterlibatan mahasiswa sebagai bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional. Proses ini dimulai dari peran perguruan tinggi sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan pembelajaran berbasis nilai-nilai kebangsaan melalui MKWK. Pembelajaran MKWK diarahkan untuk tidak hanya menanamkan pemahaman teoritis mengenai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, tetapi juga membangun kesadaran sosial serta tanggung jawab kebangsaan mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa menjadi pusat dari proses pembelajaran yang diintegrasikan dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berbasis proyek (project-based learning) yang menuntut keterlibatan aktif mahasiswa dalam merespons persoalan nyata di masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, pembelajaran MKWK mendorong pengembangan

keterlibatan warga negara mahasiswa yang ditandai dengan kepedulian sosial, partisipasi publik, serta kemampuan dalam melakukan aksi kolektif yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan hasil observasi terhadap implementasi kebijakan MKWK di Universitas Telkom menunjukkan bahwa Bagian Pengembangan Akademik memiliki kewenangan penuh dalam penetapan konten pembelajaran. Seluruh program studi diwajibkan menggunakan materi yang seragam untuk menjamin keselarasan nilai-nilai dasar yang diajarkan kepada mahasiswa. BPA juga bertanggung jawab atas rekrutmen dosen pengampu, mulai dari seleksi hingga penjadwalan perkuliahan, serta melakukan monitoring terhadap kinerja Dosen dan capaian pembelajaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau performa yang tidak optimal, BPA memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi hingga menghentikan penugasan dosen. Peran BPA juga strategis sebagai penghubung antara Dosen MKWK dan program studi, mengingat MKWK bersifat lintas prodi dan dikelola di tingkat Universitas. Universitas Telkom bahkan menyediakan gedung khusus untuk pelaksanaan MKWK dan menyelenggarakan rapat pengempuan setiap awal semester sebagai forum koordinasi dan peningkatan mutu. Saat ini, sebanyak 19 Dosen mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila di 67 kelas, dan 15 Dosen mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di 41 kelas. Seluruh Dosen telah memenuhi kualifikasi akademik minimal magister (S2) dan memiliki pengalaman yang relevan.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada beberapa regulasi baik nasional maupun institusional, serta dokumen RPS pada kedua mata kuliah di Universitas Telkom tersebut menunjukkan adanya relevansi dengan isi Kepdirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 yang menyatakan ada sepuluh bentuk pembelajaran MKWK ini, yaitu dapat berupa (1) Kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3) Seminar; (4) Pratikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja; (5) Penelitian, perancangan, atau pengembangan; (6) Pelatihan militer; (7) Pertukaran pelajar; (8) Magang; (9) Wirausaha; dan/atau (10) bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat. Lalu setiap dosen yang menjadi pengampu MKWK, diharuskan untuk memiliki deskripsi dan Rencana Pembelajaran Semester atau RPS yang dijadikan pedoman dalam proses kegiatan pembelajaran. Deskripsi mata kuliah dimaksud disini yaitu sebagai uraian singkat terkait substansi dan proses pembelajaran MKWK, yang mana pada tahapan selanjutnya menjadi pedoman untuk dosen dalam menyusun RPS.

Ada sembilan poin yang harus termuat dalam RPS, di antaranya: (a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah sks, nama dosen pengampu; (b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) Metode pembelajaran; (f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i) Daftar referensi yang digunakan.

Setelah unsur-unsur yang termuat dalam RPS, yang tentunya mekanismenya kembali pada kebijakan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Setidaknya ada tujuh teknik penilaian terhadap hasil belajar MKWK, yakni (1) Observasi; (2) Partisipasi; (3) Unjuk kerja; (4) Tes tertulis; (5) Tes lisan; (6) Angket; dan/atau (7) Teknik penilaian lain yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah. Kriteria penilaian dan bobotnya disesuaikan berdasarkan pedoman evaluasi akademik yang diberlakukan di Universitas Telkom.

Terkait sistem penelitian ini, sudah harus dijelaskan di awal perkuliahan terhadap mahasiswa. Namun demikian, keberadaan RPS yang bersifat formal belum tentu menjamin efektivitas pembelajaran, jika tidak disertai dengan pelatihan pedagogik yang terus-menerus, supervisi akademik yang berkualitas, serta sistem evaluasi yang partisipatoris dan holistik. Evaluasi pembelajaran yang hanya mengandalkan metode konvensional seperti tes tertulis, tanpa melibatkan penilaian kinerja (*performance assessment*), akan gagal menangkap dimensi *civic engagement* secara utuh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya merevitalisasi MKWK, khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, menjadi urgensi strategis dalam membangun *civic engagement* dan karakter kewargaan mahasiswa di era disrupsi. Universitas Telkom menjadi contoh representatif dari bagaimana institusi pendidikan tinggi dapat mengimplementasikan pembelajaran transformatif melalui pendekatan pedagogis berbasis proyek. Sesuai arahan Kepmen No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, Universitas Telkom telah merancang pembelajaran MKWK yang terintegrasi dengan model *project-based learning* (PjBL), di mana proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada *output* jangka pendek, tetapi juga *outcome* jangka panjang yang berdampak pada perilaku dan sikap kewargaan mahasiswa. Perencanaan pembelajaran dilakukan melalui pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan melalui *Program Learning Outcome* (PLO) dan *Course Learning Outcome* (CLO). Dalam konteks ini, CLO Universitas Telkom disesuaikan dengan prinsip OBE, yakni disederhanakan menjadi tiga indikator utama yang mencakup aspek kognitif, partisipatif, dan proyek, guna mendorong kedalaman dan fokus capaian pembelajaran.

Secara substansial, model PjBL yang diterapkan dalam MKWK di Universitas Telkom menekankan integrasi antara teori dan praktik sosial. Mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai penerima pengetahuan, tetapi juga sebagai agen aktif yang melakukan eksplorasi terhadap persoalan nyata di masyarakat dan menawarkan solusi. Bobot penilaian proyek yang mencapai 60% menggantikan UTS dan UAS konvensional menunjukkan orientasi kuat terhadap proses pembelajaran kontekstual. Mahasiswa difasilitasi untuk mengembangkan *hardskill* dan *softskill* secara simultan, seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta *problem solving*, yang semuanya merupakan bagian integral dari keterampilan abad ke-21 (Bell, 2010; Buck Institute for Education, 2016). Hal ini sejalan dengan pendapat Thomas (2000) yang menyatakan bahwa PjBL merupakan pendekatan pedagogis berbasis masalah yang mendorong partisipasi aktif dan reflektif mahasiswa dalam membangun pengetahuan.

Lebih lanjut, filosofi pembelajaran PjBL dalam MKWK di Universitas Telkom berpijak pada pemikiran konstruktivistik dari Dewey, Bruner, dan Rogers, yang menekankan pentingnya keterlibatan pengalaman langsung dalam membangun makna belajar (Morgan, 1983). Dalam kerangka ini, mahasiswa didorong untuk mengambil peran sosial profesional seperti peneliti atau aktivis komunitas, sesuai dengan model pembelajaran kontekstual yang menghubungkan antara materi MKWK dengan realitas sosial-politik (Ponta et al., 2003). Penelitian Veselov et al. (2019) juga menegaskan bahwa PjBL efektif dalam membangun tanggung jawab sosial dan kemandirian mahasiswa, sedangkan Fleming (2000) menyebutkan bahwa metode ini meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan penilaian kritis.

Pembelajaran berbasis proyek telah banyak diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan dalam rangka membentuk Profil Pelajar Pancasila. Di tingkat pendidikan anak usia dini,

pendekatan ini mulai digunakan untuk menanamkan nilai-nilai dasar sejak dini (Sulistyaningsih & Sudjarwo, 2023). Di tingkat dasar dan menengah, penerapannya meliputi berbagai strategi untuk membangun karakter dan kemampuan berpikir kritis siswa (Prasiwi et al., 2023; Amalia & Alfiansyah, 2022; Rahmawati, 2022; Jamaludin et al., 2022; Pare, 2023; Zalukhu et al., 2023; Sutriyani et al., 2019). Sementara itu, pada jenjang perguruan tinggi, proyek pembelajaran digunakan sebagai medium untuk membangun kesadaran kewargaan, memperkuat etika kebangsaan, serta membentuk karakter mahasiswa yang reflektif dan solutif (Subekti & Hariyanto, 2019; Rosidah et al., 2019; Harahap et al., 2019).

Motivasi pengembangan pembelajaran berbasis proyek sangat beragam, mulai dari upaya menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 (Fadilah, 2019), mendukung kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mendorong aktivitas pembelajaran di luar ruang kelas (Nanggala & Suryadi, 2020), penerapan pembelajaran interaktif dan kontekstual (Istianah, 2020), penguatan moderasi beragama (Winata et al., 2020), hingga pembentukan karakter moral entrepreneur melalui pendidikan Pancasila (Trihastuti et al., 2020).

Dalam konteks ini, implementasi pembelajaran MKWK di Universitas Telkom yang berbasis proyek dan mengintegrasikan nilai-nilai kewargaan serta isu sosial kekinian, merupakan bentuk keberlanjutan dan perluasan dari tren nasional tersebut. Model ini tidak hanya mendorong mahasiswa untuk memiliki kompetensi abad ke-21, tetapi juga menjembatani pembelajaran normatif dengan praktik nyata yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembelajaran berbasis proyek menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan *civic engagement* dan karakter kewargaan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta tujuan pendidikan nasional.

Secara kelembagaan, Universitas Telkom menunjukkan kesiapan struktural dalam mendukung revitalisasi MKWK. Dengan hanya dua dosen tetap pengampu MKWK, namun ditunjang oleh sarana *Learning Management System* (LMS) yang memadai, pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel dan efektif. LMS berfungsi sebagai platform koordinasi proyek, distribusi materi, hingga pemantauan progres tugas mahasiswa. Hal ini memperkuat prinsip bahwa *civic engagement* tidak hanya dibentuk melalui konten pembelajaran, tetapi juga melalui desain instruksional dan infrastruktur pendukung yang responsif.

Penerapan kurikulum terintegrasi dalam MKWK di Universitas Telkom juga mencerminkan pendekatan *integrated curriculum* sebagaimana dikemukakan Beane (1997), yang memungkinkan keterhubungan lintas disiplin dan meningkatkan pemahaman mahasiswa atas kompleksitas kehidupan sosial. Misalnya, tugas proyek Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan secara terintegrasi dan diarahkan untuk menjawab isu-isu sosial aktual, seperti ketimpangan sosial atau isu lingkungan, yang dikerjakan dalam kemitraan dengan pemerintah daerah atau komunitas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak bersifat abstrak, melainkan memiliki kontribusi langsung terhadap masyarakat. Keberhasilan implementasi pembelajaran MKWK berbasis proyek ini relevan dengan studi yang dilakukan oleh *Buck Institute for Education*, (2016) menyatakan bahwa PjBL dapat mengarahkan peserta didik untuk mencapai keterampilan abad ke-21, yaitu keterampilan 4C (Komunikasi, Kolaborasi, Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah, Kreativitas dan Inovasi), dan nilai karakter dan kemampuan berpikir tingkat tinggi (dalam Hamidah, H., dkk., 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan ditentukan oleh konten dan konteks implementasi Grindle (1980). Universitas Telkom memiliki konten kebijakan yang jelas melalui pengadopsian model *Digital-Based Collaborative and Active*

Learning to Create Meaningful Education (CAL-CreateME), serta dukungan struktural melalui Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor: KWR1.150/AKD1/AKDBPA/2023. Dukungan ini menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan internal dan nasional dalam merancang pembelajaran berbasis proyek yang terukur dan kontekstual. Dalam perspektif Putnam (2000), *civic engagement* dibentuk oleh struktur sosial dan lingkungan institusional yang memungkinkan kolaborasi, partisipasi, dan interaksi bermakna antar individu. Universitas Telkom, melalui model PjBL kolaboratif, menciptakan “ruang sosial” yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan aktif. Proyek-proyek kolaboratif dengan komunitas lokal memperkuat jembatan antara dunia akademik dan masyarakat, serta membentuk kesadaran mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Hal tersebut diperkuat pendapat Akirav, (2023) PjBL dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep akuntabilitas, transparansi, hak sipil dan hak asasi manusia, serta kemampuan dan kewajiban peserta didik untuk berkontribusi pada komunitas mereka.

Hal tersebut juga diperkuat dalam perspektif kerangka teori konstruktivisme sosial yang dikemukakan Berger dan Luckmann (1966), pembelajaran MKWK berbasis proyek menjadi wahana interaksi sosial dan konstruksi makna secara kolektif. Mahasiswa dan dosen berperan sebagai subjek yang secara aktif membentuk realitas sosial kewarganegaraan melalui diskusi, observasi lapangan, dan refleksi kritis. Melalui proses ini, nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip kewarganegaraan tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi dimaknai melalui pengalaman sosial yang nyata.

Dengan mengacu pada tiga landasan teoritis implementasi kebijakan, *civic engagement*, dan konstruktivisme sosial dapat disimpulkan bahwa revitalisasi MKWK melalui pendekatan PjBL di Universitas Telkom menggambarkan langkah strategis dan transformatif. Desain pembelajaran yang terstruktur, didukung oleh kelembagaan yang kuat dan pendekatan pedagogis yang kontekstual, telah menjadikan MKWK bukan sekadar mata kuliah normatif, melainkan sebagai medium pembentukan *civic engagement* dan karakter kewargaan mahasiswa secara substantif dan berkelanjutan. Revitalisasi seperti ini layak direplikasi di perguruan tinggi lainnya sebagai bagian dari strategi nasional pendidikan kewarganegaraan yang progresif dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Simpulan

Revitalisasi MKWK di Universitas Telkom melalui pembelajaran berbasis proyek secara signifikan memperkuat *civic engagement* dan karakter kewargaan pada mahasiswa. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi antara kebijakan nasional (Kepdirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020) dan kemampuan institusi dalam mengadaptasi kebijakan kedalam kurikulum kontekstual. MKWK berubah dari sekadar transfer nilai menjadi ruang partisipatif, di mana mahasiswa berperan aktif sebagai agen perubahan sosial dan dosen berfungsi sebagai fasilitator pemikiran kritis. Melalui integrasi kebijakan dan praktik pembelajaran, MKWK mengalami transformasi dari sekadar sarana transfer nilai menjadi ruang partisipatif yang memungkinkan mahasiswa terlibat secara langsung dalam merespons persoalan-persoalan publik melalui proses reflektif dan kolaboratif. Studi ini masih terbatas pada satu institusi dan belum mengukur dampak jangka panjang, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas konteks dan menggunakan metode kuantitatif untuk evaluasi lebih mendalam.

Referensi

Anggraeni, K. (2016). The Role of Non-State Actors in Advancing Global Development

- Commitments. SWITCH-Asia Briefing, No. 5. DIIS
- Akirav, O. (2023). Active civic education using project-based learning and attitudes towards civic engagement. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 17(1).
- Amalia, S. S., & Alfiansyah, I. (2022). Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Al-Fatih*, 5(2), 239-254.
- Astin, A. W., Vogelgesang, L. J., Ikeda, E. K., & Yee, J. A. (2000). How Service Learning Affects Students. Higher Education Research Institute, University of California, Los Angeles.
- Beane, J. A. (1997). Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education. Teachers College Press.
- Bell, J. (2010). Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Education, Health and Social Science (5th ed.). Open University Press. SCIRP
- Boss, S. (2016). *PBL for 21st Century Success: Teaching Critical Thinking, Collaboration, Communication, and Creativity* (J. Larmer & J. R. Mergendoller, Eds.). Novato, CA: Buck Institute for Education.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. Taylor & Francis Online
- Cahyono, H., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2022). Peran program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pasundan Bandung dalam mengembangkan civic engagement di perguruan tinggi (Studi mahasiswa KKN di Desa Mekarharja Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka). *Jambura Journal Civic Education*, 2(2), 136-146. <https://doi.org/10.37905/jacedu.V2i1.14503>
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications. University of Montenegro
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)*, 2(02), 66-78.
- Fleming, N. D. (2000). Project-based learning: Motivation, independence, responsibility, and critical thinking. Wellington: Learning Styles Publications.
- Gofur, A., & Sunarso, S. (2019). Pengaruh Literasi Media Massa Online Terhadap Civic Engagement Politik Aktivis Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 117-125. Journal 2
- Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press. Amazon+1JSTOR+1
- Hamidah, H., dkk. (2020). *Project-Based Learning*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Harahap, N. A., Ummah, K., Rohanawati, A. N., & Mardhatillah, S. R. (2019). Pengembangan model pembelajaran Student Center Learning (SCL) berbasis aktivitas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila di Fakultas Hukum. *Refleksi Pembelajaran Inovatif*, 1(2), 182-197.
- Hidayah, Y. (2020). *Pengembangan Model Belajar Keterlibatan (MBK) untuk Memperkuat Partisipasi Politik dan Civic engagement Warga Negara Muda di Era Digital*. (Disertasi). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Jacoby, B., & Associates. (2009). Civic Engagement in Higher Education: Concepts and Practices. Jossey-Bass. Amazon+1Wiley+1
- Jamaludin, J., Amus, S., & Hasdin, H. (2022). Penerapan Nilai Profil Pelajar Pancasila Melalui Kegiatan Kampus Mengajar Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 698-709.
- Keeter, S., Zukin, C., Adolina, M., & Jenkins, K. (2002). The civic and political health of the nation: A generational portrait. *Report*, 45.
- Kurniawaty, I. (2023). *Implementasi kebijakan mata kuliah wajib kurikulum dalam pembinaan karakter mahasiswa* (Disertasi). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott,

- Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. Amazon+2Amazon+2Metodos+2
- Morgan, D. L. (1983). *Deterrence: A Conceptual Analysis*. SAGE Publications. Amazon+1Amazon+1
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10-23.
- Nasirin, A., & Isnarmi, I. (2019). Penguatan Civic Engagement di Lembaga Pelayanan Sosial. *Journal of Civic Education*, 1(4), 325-332. ThaiJo2.1: Thai Journal Online+1ResearchGate+1
- Pare, A. (2023). Kesiapan Peserta Didik Melaksanakan Profil Pelajar Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Ende. *EDUCANDUM*, 9(1), 63-75.
- Ponta, T., Popa, C. C., & Badea, M. (2003). *Project-based learning in higher education: Educational strategy for student-centered learning*. University of Oradea Publishing.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American Community*. Simon & Schuster. Vox+2SCIRP+2Google Books+2
- Rahmat, & Tanszil, S. W. (2017). Model Pembinaan Pendidikan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Civics*, 21(1), 1-17.
- Rahmawati, L. E., Wahyudi, A. B., Purnanto, A. W., Latifa, R., & Purnomo, E. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Menggunakan Model CIPP. *Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 92-102.
- Rosidah, K. K., Utomo, S. H., & Wahyono, H. (2019). Pembelajaran Ekonomi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD'45 melalui Pembelajaran Proyek. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 4(9), 1190-1201.
- Saleh, M. (2023). *Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kecakapan Abad 21 untuk Mewujudkan Civic engagement Mahasiswa*. (Disertasi). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Subekti, I., & Hariyanto, H. (2019). Efektivitas Pembelajaran Berbasis Proyek Produk Vlog Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. *Jurnal Edukasi: Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(2), 11-24.
- Sulistyaningsih, S., & Sujarwo, S. (2023). Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Pembelajaran Berbasis Proyek di Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3205-3214.
- Sutriyani, S., Mulawarman, W. G., & Hudiyono, Y. (2019). Pengembangan bahan ajar menulis esai dengan memanfaatkan kearifan lokal melalui pembelajaran berbasis proyek (PBP) Siswa SMA. *Diglosia*, 2(1), 39-46.
- Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. Autodesk Foundation. SCIRP+1bobbpearlman.org+1
- Veselov, G. E., Pljonkin, A. P., & Fedotova, A. Y. (2019). Project-based learning as an effective method in education. In *Proceedings of the 2019 International Conference on Education and Learning* (pp. 1-5). ACM. <https://doi.org/10.1145/3341042.3341046>
- Vogelgesang, L. J., Ikeda, E. K., & Yee, S. S. (2000). *Civic Engagement: The Role of Higher Education*. [Penerbit].
- Winata, K. A., Sudrajat, T., Yuniarsih, Y., & Zaqiah, Q. Y. (2020). Peran Dosen dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Mendukung Program Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 98-110.
- Zalukhu, B., Napitu, U., Zalukhu, Y., & Hulu, N. S. (2023). Pengaruh Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Terhadap Pembentukan Karakter dan Moral Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2102-2115